

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN Berkas Utang

Nomor : [REDACTED]
 Tanggal : 15-01-2017 11:20

Nama : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
 N.P.W.P : [REDACTED]
 No. P.K.P : [REDACTED]
 Ms/Thn pajak : 12/2016

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 23/26 / 24.000,00/IDR (KB) / 630602972
 Pembetulan : 1

Di terima langsung (dikal)
 Tgl. Terima : 15-01-2017

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
Surat diterima : 1. langsung	[Signature]
2. melalui pos	

Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. Dibertahukan kepenuntut umum	
2. Penyidikan	
3. Selesai disidik	
4. Disampaikan kepenuntut umum	

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN	
Uraian	Prf/Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1	
2. Selesai di-Edit	
3. Selesai direkam	
4. Dicatat pada 1Q - 2	
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap	
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan	
7.2. Kantor	

Uraian	Prf/Tg
PENETAPAN	
1. STP	
2. SKPN	
3. SKPKB	
4. SKPKBT	
5. SKPLB	
RESTITUSI	
1. SKPKPP	
2. SPMKP	
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas	
2. Diteruskan ke :	
3. Diterima kembali	

1. Dividen	411127/01		
2. Bunga	411127/02		
3. Royalti	411127/03		
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/04		
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/10		
6. Hadiah dan penghargaan	411127/00		
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/00		
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/02		
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100		
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/00		
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/00		
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/00		
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105		
JUMLAH		500.000	24.000

Terbilang : lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
 ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN


- | | |
|--|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <input type="text"/> Lembar. | 4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus. |
| 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. | 5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). |
| 3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : <input type="text"/> Lembar. | |

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK
 Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]

Diisi Oleh Petugas
 SPT Masa Diterima :
 Langsung dari WP
 Melalui Pos
 Tanggal : / /
 tanggal bulan tahun

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input checked="" type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-1
			Masa Pajak 12 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	
2. Nama	
3. Alamat	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPH yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK - 244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultasi	411124/104		
d. Jasa lain :****) <i>Sencek</i>		500.000	24.000
1)			
2)			
3)			
7. JUMLAH			24.000

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPH yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH		500.000		24.000

Terbilang : Dua puluh empat ribu rupiah

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
 ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : Lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : Lembar.	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama : *[Signature]*

Tanggal : 12 / 2016

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima : Langsung dari WP
 Melalui Pos

Tanggal : 12 / 2016

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK**

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : (2)

NPWP : (3)
 Nama :
 Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) <i>Snack</i>	<i>500.000</i>	<input type="checkbox"/>	2%	<i>24.000</i>
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH					<i>24.000</i>

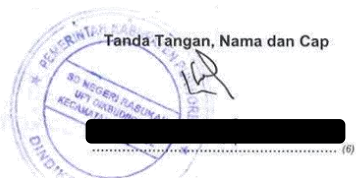
Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Purabaya 28.01.2016 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :
 Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap



*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

LAMPIRAN

1

Lembar

Pengawasan Arus

Dokumen

LAMPIRAN

2

SPT Masa PPh

Pasal 23 dan/atau

Pasal 26

LAMPIRAN

3

Bukti Pemotongan

PPh Pasal 23

LAMPIRAN

4

Cetakan Kode Billing dan Bukti Pembayaran